

RINGKASAN

PRASETYO SATRIO WIDODO, NIM : NIM: 202302020295.
Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 3 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum. Pembimbing I: Dr. Teguh Pramono, M.Si. Pembimbing II: Dr. IGG Heru Marwanto, MM.

Tujuan penelitian ini adalah pertama, mendeskripsikan dan menganalisis implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 3 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum. Kedua, mendeskripsikan dan menganalisis faktor-faktor penghambat dan pendukung dalam implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 3 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif analisis. Lokasi penelitian ditetapkan di Kabupaten Kediri dengan fokus pada pelaksanaan tugas Satpol PP sebagai pelaksana teknis perda. Informan kunci ditentukan dengan teknik purposive sampling, dan jumlah informan dikembangkan menggunakan teknik snowball sampling. Data diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan dokumentasi. Analisis data menggunakan model interaktif Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan/verifikasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Perda No. 3 Tahun 2021 berjalan cukup baik berdasarkan indikator teori Edward III, yaitu: Komunikasi kebijakan dilaksanakan melalui transmisi, kejelasan, dan konsistensi informasi kepada masyarakat dengan sosialisasi, patroli, dan koordinasi lintas instansi. Sumber daya mendukung implementasi melalui ketersediaan 326 personel Satpol PP, pemahaman perda melalui pelatihan, serta kejelasan wewenang yang berasal dari Bupati. Namun, keterbatasan fasilitas dan distribusi SDM masih menjadi kendala. Disposisi pelaksana menunjukkan komitmen tinggi dengan capaian kinerja penegakan perda, pembinaan, dan operasi gabungan, meski insentif tambahan di luar gaji tidak tersedia. Struktur birokrasi ditunjang oleh SOP internal dan fragmentasi tugas antarbidang, meskipun beberapa SOP belum terdokumentasi secara detail. Faktor penghambat implementasi perda meliputi keterbatasan sarana prasarana dan anggaran, beban kerja tinggi akibat luasnya wilayah dengan 26 kecamatan, serta kurangnya sosialisasi karena keterbatasan fasilitas. Faktor pendukung mencakup kejelasan wewenang, komitmen tinggi aparat Satpol PP, koordinasi internal dan eksternal dengan instansi lain, serta pemahaman perda yang cukup baik di kalangan petugas.

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan; Ketertiban Umum; Satpol PP; Peraturan Daerah.

SUMMARY

PRASETYO SATRIO WIDODO, NIM: NIM: 202302020295. *Implementation of Kediri Regency Regional Regulation Number 3 of 2021 concerning the Implementation of Public Order. Supervisor I: Dr. Teguh Pramono, M.Si. Supervisor II: Dr. IGG Heru Marwanto, MM.*

The purpose of this research is first, to describe and analyze the implementation of Kediri Regency Regional Regulation Number 3 of 2021 concerning the Implementation of Public Order. Second, describe and analyze the inhibiting and supporting factors in the implementation of Kediri Regency Regional Regulation Number 3 of 2021 concerning the Implementation of Public Order.

This research uses a qualitative approach with a descriptive research type of analysis. The location of the research was determined in Kediri Regency with a focus on the implementation of Satpol PP's duties as the technical implementer of the regional regulation. Key informants were determined by purposive sampling technique, and the number of informants was developed using the snowball sampling technique. Data were obtained through in-depth interviews, field observations, and documentation. Data analysis uses the Miles and Huberman interactive model which includes data reduction, data presentation, and conclusion/verification.

The results of the study show that the implementation of Regional Regulation No. 3 of 2021 is going quite well based on Edward III's theoretical indicators, namely: Policy communication is carried out through the transmission, clarity, and consistency of information to the public through socialization, patrol, and cross-agency coordination. Resources support implementation through the availability of 326 Satpol PP personnel, understanding of local regulations through training, and clarity of authority from the Regent. However, limited facilities and distribution of human resources are still an obstacle. The disposition of the implementer shows a high commitment to the achievement of performance in local regulation enforcement, coaching, and joint operations, although additional incentives outside of salary are not available. The bureaucratic structure is supported by internal SOPs and fragmentation of tasks between fields, although some SOPs have not been documented in detail. Factors that hinder the implementation of regional regulations include limited infrastructure and budget facilities, high workload due to the large area with 26 sub-districts, and lack of socialization due to limited facilities. Supporting factors include clarity of authority, high commitment of Satpol PP officials, internal and external coordination with other agencies, and a fairly good understanding of local regulations among officers.

Keywords: *Policy Implementation; Public Order; Satpol PP; Regional Regulations*